

## **Analisis Potensi dan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau**

**Cindy Candrawati<sup>1</sup>, Alih Aji Nugroho<sup>2</sup>**  
**University of Western Australia<sup>1</sup>, Politeknik STIA LAN Jakarta<sup>2</sup>**  
candrawaticindy@gmail.com<sup>1</sup>, alihnugroho@stialan.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Inequality is a problem due to uneven development. Regional expansion offers one solution to address this issue by utilizing the potential of each area. In Riau Islands Province, inequality is evident in the development process, with Batam City showing the highest development index across various sectors compared to the six other regencies and cities. A literature review, along with studies on regional potential and inequality, revealed that Location Quotient analysis indicated growth in the base sector across the regencies of Riau Islands Province. The Gini Coefficient data showed a downward trend in inequality over the past decade. However, significant disparities in per capita income persist, as reflected by the variation coefficient and Williamson Index.*

**Keywords:** Development Inequality, Regional Potential, Equity, Gini Index

### **Abstrak**

Ketimpangan merupakan masalah yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Pemekaran wilayah menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini melalui pemanfaatan potensi di setiap wilayah. Di Provinsi Kepulauan Riau, ketimpangan terlihat dalam proses pembangunan, dengan Kota Batam menunjukkan indeks pembangunan tertinggi di berbagai sektor dibandingkan dengan enam kabupaten/kota lainnya. Kajian literatur, serta studi pengukuran potensi dan ketimpangan, menunjukkan bahwa analisis *Location Quotient* mengindikasikan adanya peningkatan sektor basis di beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Data Koefisien Gini juga menunjukkan tren penurunan ketimpangan selama satu dekade terakhir. Meskipun demikian, masih terdapat disparitas pendapatan per kapita yang besar di Provinsi Kepulauan Riau, seperti terlihat dalam koefisien variasi dan Indeks Williamson.

**Kata Kunci :** Ketimpangan Pembangunan, Potensi Daerah, Pemerataan, Indeks Gini

### **PENDAHULUAN**

Peningkatan kesejahteraan dalam arti luas merupakan tujuan utama dari kebijakan pembangunan. Pembangunan itu sendiri merupakan sebuah proses yang melibatkan perubahan struktural "*structural change*" baik dalam sikap, mental, sosial, institusi, maupun target pembangunan, seperti percepatan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan (Fitri et al., 2022). Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya (Raharti et al., 2021). Pembangunan ekonomi menjadi salah satu bagian dari seluruh usaha pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Pembangunan ekonomi menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, yang diiringi oleh pembangunan sosial, politik, dan budaya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang (Fitri et al., 2022).

Namun, dalam proses pembangunan selalu terdapat berbagai tantangan. Perbedaan dalam potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, dan kinerja setiap daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan (Zasriati,

2022). Ketimpangan ini bahkan menjadi salah satu masalah global dalam pembangunan ekonomi. Todaro & Smith (2012) mengungkapkan bahwa masalah pembangunan tidak hanya tentang meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi juga tentang siapa yang ikut berperan dalam pertumbuhan tersebut. Jika pertumbuhan tersebut dihasilkan oleh sebagian besar masyarakat, maka manfaatnya pun akan dinikmati secara lebih merata. Sebaliknya jika pertumbuhan hanya dihasilkan oleh sebagian kecil golongan kaya, maka manfaatnya sebagian besar akan kembali ke golongan tersebut dan ketimpangan akan memburuk. Hal ini sejalan dengan studi OECD yang menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan tidak secara otomatis dapat mengalir (*trickle down*) ke seluruh lapisan masyarakat tanpa upaya pemerataan pembangunan (Nugroho, 2018).

Selain itu, penelitian OECD (2014) juga mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Ketimpangan menghambat akumulasi modal manusia, terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan keterampilan. Oleh karena itu, ketimpangan tidak hanya merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, tetapi juga menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan itu sendiri.

Saat ini, tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran (Klasen, 2010 ; Todaro & Smith, 2015). Agenda ini tercermin dalam target ke-8 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menekankan pentingnya pertumbuhan inklusif untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan (Niekerk, 2020). Menurut Todaro & Smith (2012), selain menanggulangi kemiskinan, pemerintah perlu menjaga distribusi pendapatan yang merata karena ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan ketidakadilan.

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menjadi isu yang penting. Ketimpangan di Indonesia masih cukup lebar dengan koefisien Gini sebesar 0.38 pada September 2022 (BPS, 2023b). Sebagai negara kepulauan dengan beragam geografi, sosial budaya, potensi alam, dan potensi ekonomi, kecepatan pembangunan di setiap wilayah berbeda-beda, bergantung pada kualitas sumber daya dan pengelolaannya. Perbedaan dalam kecepatan pembangunan ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya disparitas antar wilayah di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan regional merujuk pada ketidakmerataan pendapatan antara masyarakat di satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sejumlah penelitian telah menganalisis dinamika pembangunan daerah dan evolusi ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia. Mengingat distribusi spasial yang tidak merata dalam hal sumber daya, infrastruktur publik, dan kegiatan ekonomi, ketimpangan spasial sulit dihindari. Bahkan, ketimpangan antar kabupaten/kota di dalam provinsi juga memainkan peran penting (Akita & Miyata, 2018).

Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau, terdiri dari tujuh kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Di antara wilayah-wilayah ini, Kota Batam menonjol sebagai kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau, dengan kontribusi mencapai lebih dari 64 persen (BPS, 2023a). Kondisi ini mengakibatkan disparitas pembangunan yang signifikan antara Kota Batam dan wilayah

lainnya di provinsi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam satu dekade terakhir. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah guna memfasilitasi persatuan, kohesi, dan stabilitas yang akan mendukung percepatan pembangunan nasional.

## **KAJIAN LITERATUR**

Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus kajian bagi banyak peneliti di bidang administrasi dan ekonomi (Barbieri, 2009a, 2009b; Esping-Andersen & Myles, 2012; Hilmer et al., 2012; Lamont, 2018; Singh et al., 2019; Snyder, 2004). Penelitian Ghifara et al. (2022) yang berjudul *“The Effect of Economic Growth, Government Spending, and Human Development Index toward Inequality of Income Distribution in the Metropolitan Cities in Indonesia”* menjelaskan bahwa ketimpangan dipahami sebagai salah satu aspek penting dalam pencapaian kesejahteraan. Ketimpangan ini dapat diminimalisir melalui pemerataan pendapatan yang didorong oleh pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengukuran ketimpangan ekonomi dalam penelitian ini mengacu pada nilai Indeks Gini (*Gini Ratio*). Lima kota metropolitan di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang, dikategorikan memiliki ketimpangan sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sementara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah (belanja modal) memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan, terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kelima kota tersebut. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengalokasikan belanja modal secara optimal guna memacu pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan (Awolaran et al., 2022; Husain et al., 2021; Ma et al., 2019; Mumtaz & Whiteford, 2017; Rudiana, 2016; Sufriyadi, 2014).

Penelitian Younsi & Bechtini (2018) berjudul *“Economic Growth, Financial Development, and Income Inequality in BRICS Countries: Does Kuznets’ Inverted U-Shaped Curve Exist?”* menyelidiki ketimpangan pendapatan di beberapa negara BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara tersebut, para pembuat kebijakan disarankan merancang kebijakan fiskal yang tegas, serta mendorong pembangunan yang inklusif melalui redistribusi aset secara progresif dan pembangunan pedesaan.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan potensi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemekaran wilayah menjadi instrumen penting karena berpotensi meningkatkan pemerataan pembangunan. Penelitian Winarsi et al. (2020) yang berjudul *“Sustainable Regional Expansion Model in Order to Increase The Regional Potency: Case Study in Indonesia”* menyoroiti bahwa asas desentralisasi digunakan untuk mendelegasikan kewenangan pembangunan kepada daerah. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada di wilayahnya. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah. Pemekaran daerah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi wilayah, kondisi sosial-budaya dan politik, jumlah penduduk, serta luas wilayah, yang memungkinkan terlaksananya otonomi daerah secara efektif (Bisello, 2020; Forgues-Puccio & Lauw,

2021; Khan et al., 2020; Myeong et al., 2018; Pudzis et al., 2016; United Nation Conference on Trade and Development, 2010). Penelitian ini juga menekankan bahwa pemekaran daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan demokrasi, pengelolaan keuangan, serta optimalisasi pengelolaan potensi wilayah (Br Sitepu & Maulana, 2021; Nurzaman & Rifa'i, 2019; Rozikin et al., 2020).

Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di berbagai sektor. Upaya ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya secara optimal dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemanfaatan potensi daerah juga dijabarkan pada penelitian Ariani & Suryantini, (2020) yang berjudul "*Analysis of Regional Potency (Case Study in Kutai Kartanegara and Penajam Paser Utara Regencies)*". Penelitian ini menyoroti bahwa untuk menggerakkan perekonomian, pemerintah daerah membutuhkan modal, yang sebagian besar berasal dari potensi ekonomi daerah. Potensi ekonomi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dibedakan menjadi dua kategori: pertama, sumber pendapatan yang sudah ada dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan kedua, potensi ekonomi yang masih tersembunyi atau belum dioptimalkan, yang baru akan memberikan hasil setelah dilakukan upaya pengembangan yang tepat (Zulkarnaen, 2016). Potensi ekonomi daerah, apabila dikelola secara optimal, dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Pembangunan ekonomi daerah juga harus mampu mendorong motivasi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sumber daya yang tersedia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur potensi dan ketimpangan. Potensi dilihat dari indeks *Location Quotient* (LQ) dan ketimpangan diukur dengan koefisien Gini, koefisien variasi, serta indeks Williamson. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau selama satu dekade terakhir. Data yang dianalisis bersumber dari Badan Pusat Statistik, yaitu data Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB per Kapita ADHB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota menurut lapangan usaha, dan koefisien Gini. Periode data mencakup tahun 2010 hingga 2022. Pendekatan dan metode analisis dijelaskan pada sub-bagian berikutnya.

### **Analisis Potensi dengan Indeks *Location Quotient***

*Location Quotient* (LQ) mengukur keunggulan komparatif sektor ke-j di kabupaten/kota ke-i relatif terhadap wilayah yang lebih luas, seperti provinsi atau negara. Persamaan LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{X_j/X_{..}}$$

- $LQ_{ij}$ : proporsi PDRB sektor ke-j di kabupaten/kota ke-i terhadap proporsi PDRB sektor yang sama di Provinsi Kepulauan Riau
- $X_{ij}$ : PDRB dari sektor ke-j di kabupaten/kota ke-i
- $X_i$ : total PDRB dari semua sektor di kabupaten/kota ke-i.
- $X_j$ : total PDRB dari sektor ke-j di Provinsi Kepulauan Riau
- $X_{..}$ : total PDRB Provinsi Kepulauan Riau

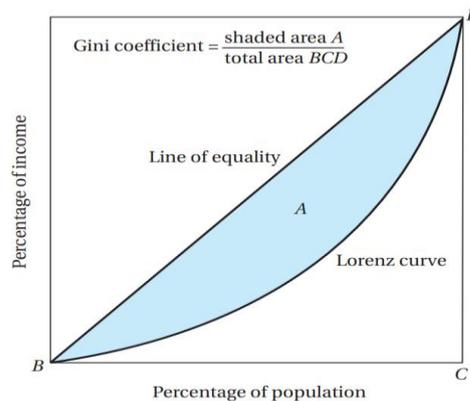
Ketika nilai  $LQ_{ij}$  lebih dari 1, ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis, yang menunjukkan bahwa komoditas j di wilayah yang diteliti mempunyai keunggulan komparatif. Jika nilai  $LQ_{ij}$  sama dengan 1 menandakan sektor non basis, di mana komoditas j di wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif dan hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lokal. Lebih lanjut, nilai  $LQ_{ij}$  kurang dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut juga non basis, dengan komoditas j yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga memerlukan impor dari wilayah lain.

### Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ekonom umumnya membedakan dua jenis utama pengukuran distribusi pendapatan untuk analisis dan kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan personal dan distribusi pendapatan faktor fungsional (Todaro & Smith, 2012). Distribusi pendapatan personal merujuk pada alokasi total pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau keluarga dalam masyarakat. Di sisi lain, distribusi pendapatan faktor fungsional berkaitan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh setiap faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Beberapa indikator digunakan untuk mengukur ketimpangan, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

#### 1. Koefisien Gini

Tingkat relatif ketimpangan pendapatan dalam suatu negara dapat ditentukan melalui perhitungan rasio antara area di bawah kurva Lorenz dan diagonal dengan total area setengah persegi di mana kurva tersebut berada. Rasio ini umumnya dikenal sebagai koefisien Gini, sebuah indikator yang mengukur ketimpangan agregat. Nilai koefisien Gini berkisar dari 0, yang menandakan kesetaraan total, hingga 1, yang menunjukkan ketidaksetaraan total. Menurut Todaro & Smith (2012), koefisien Gini antara 0,50 dan 0,70 umumnya mengindikasikan negara dengan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata. Sebaliknya, negara dengan distribusi yang lebih merata memiliki koefisien Gini antara 0,20 hingga 0,35, sedangkan nilai sekitar 0,44 menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi.



**Gambar 1. Koefisien Gini**

Sumber: (Todaro & Smith, 2012)

## 2. Koefisien Variasi

Dalam statistik, koefisien variasi (CV) adalah ukuran dispersi yang umum digunakan, dihitung dengan membagi deviasi standar sampel dengan rata-rata sampel. Ini merupakan indikator ketidaksetaraan lain yang memenuhi empat kriteria yang sama dengan koefisien Gini. Koefisien variasi efektif untuk menilai seberapa jauh data menyebar dari rata-rata mereka. Nilai CV yang lebih rendah menunjukkan bahwa data lebih seragam (homogen), sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan keragaman data yang lebih besar (heterogen). Formula untuk koefisien variasi adalah sebagai berikut:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \%$$

CV           = Koefisien Variasi  
s             = Standar Deviasi  
 $\bar{x}$           = Rata-rata

## 3. Indeks Williamson

Indeks Williamson mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah, dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari masing-masing wilayah. Metodologi pengukuran ini menetapkan bahwa nilai indeks yang lebih tinggi mengindikasikan perbedaan ekonomi yang lebih besar antara wilayah dan rata-rata mereka. Formula untuk menghitung Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f_i/n}}{\bar{Y}}$$

$I_w$ : Indeks Williamson  
 $Y_i$ : PDRB per kapita kabupaten/kota ke-i  
 $\bar{Y}$ : Rata-rata PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota  
 $f_i/n$ : Proporsi populasi penduduk kabupaten/kota ke-i terhadap total populasi penduduk Provinsi Kepulauan Riau.

Nilai Indeks Williamson yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih besar antara kabupaten atau kota. Nilai Indeks Williamson sebesar 0 menandakan bahwa tidak ada ketimpangan, atau distribusi yang merata sempurna; nilai hingga 0,3 menunjukkan kesenjangan yang rendah; nilai antara 0,3 dan 0,5 menandakan kesenjangan yang moderat; dan nilai dari 0,5 hingga 1 menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Potensi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

#### Indeks *Location Quotient*

Analisis Location Quotient (LQ) menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2010 dan 2022 menunjukkan keberagaman sektor basis di masing-masing wilayah. Sektor basis, diidentifikasi dengan nilai LQ yang lebih dari 1,

mencerminkan konsentrasi kegiatan tertentu di sebuah kabupaten atau kota relatif terhadap keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau. Detail lengkap dari hasil analisis LQ ini dapat dilihat dalam tabel yang disajikan berikut ini:

**Tabel 1. Nilai Indeks Location Quotient untuk Setiap Lapangan Usaha di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun 2010 dan 2022**

Kabupaten/Kota	Lapangan Usaha																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T		
2010																			
Karimun	4.49	0.70	0.36	0.38	0.31	0.84	2.38	1.20	1.09	1.72	0.67	2.06	2.85	1.79	2.66	1.84	3.05		
Bintan	1.53	0.92	1.00	0.16	0.44	0.90	1.18	0.77	2.39	0.71	0.63	0.71	0.20	1.00	1.37	0.99	0.41		
Natuna	2.48	4.35	0.02	0.09	0.05	0.33	0.29	0.16	0.19	0.26	0.04	0.33	0.04	0.77	0.10	0.28	0.13		
Lingga	6.76	0.58	0.02	0.32	0.22	1.19	2.11	0.63	1.01	1.61	0.38	1.85	0.24	3.08	4.21	2.84	1.42		
Kepulauan Anambas	1.02	4.29	0.32	0.04	0.01	0.17	0.20	0.05	0.03	0.15	0.04	0.26	0.02	0.63	0.10	0.12	0.11		
Batam	0.30	0.01	1.49	1.60	1.57	1.13	0.83	1.17	1.16	1.16	1.40	1.02	1.06	0.51	0.77	0.89	0.97		
Tanjungpinang	0.24	0.20	0.21	0.40	0.48	2.06	2.80	2.15	0.64	1.56	1.23	2.05	2.74	4.26	2.79	2.83	2.61		
2022																			
Karimun	4.92	0.94	0.30	0.24	0.37	1.04	2.07	1.56	1.34	1.17	0.61	2.64	6.32	1.58	2.51	2.16	5.14		
Bintan	2.41	0.28	1.02	0.11	0.60	1.14	1.06	1.18	3.01	0.46	0.59	0.99	0.27	1.11	1.37	1.24	0.64		
Natuna	3.85	5.76	0.02	0.07	0.06	0.36	0.38	0.34	0.29	0.27	0.05	0.59	0.08	0.78	0.15	0.36	0.26		
Lingga	7.20	0.47	0.02	0.24	0.25	1.08	2.55	0.76	1.29	1.23	0.31	2.29	0.33	3.25	5.37	3.46	2.82		
Kepulauan Anambas	1.67	6.65	0.00	0.05	0.02	0.27	0.29	0.07	0.06	0.17	0.04	0.51	0.05	0.75	0.14	0.25	0.23		
Batam	0.32	0.00	1.42	1.49	1.47	1.05	0.67	0.96	0.99	1.05	1.32	0.90	0.82	0.48	0.59	0.79	0.56		
Tanjungpinang	0.23	0.00	0.16	0.18	0.71	1.41	3.47	2.56	0.88	1.23	1.29	2.84	4.72	4.58	3.38	2.93	4.35		

Sumber: (BPS 2023, diolah)

**Keterangan:**

**Sektor Basis (LQ>1)**

- A : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- B : Pertambangan dan Penggalian
- C : Industri Pengolahan
- D : Pengadaan Listrik dan Gas
- E : Pengadaan Air, Peng. Sampah, Limbah, Daur Ulang
- F : Konstruksi
- G : Perd. Besar, Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor
- H : Transportasi dan Pergudangan
- I : Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J : Informasi dan Komunikasi
- K : Jasa Keuangan dan Asuransi
- L : Real Estat
- M,N : Jasa Perusahaan
- O : Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib
- P : Jasa Pendidikan
- Q : Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- R,S,T : Jasa Lainnya

**Tabel 2. Identifikasi Sektor Basis di Provinsi Kepulauan Riau**

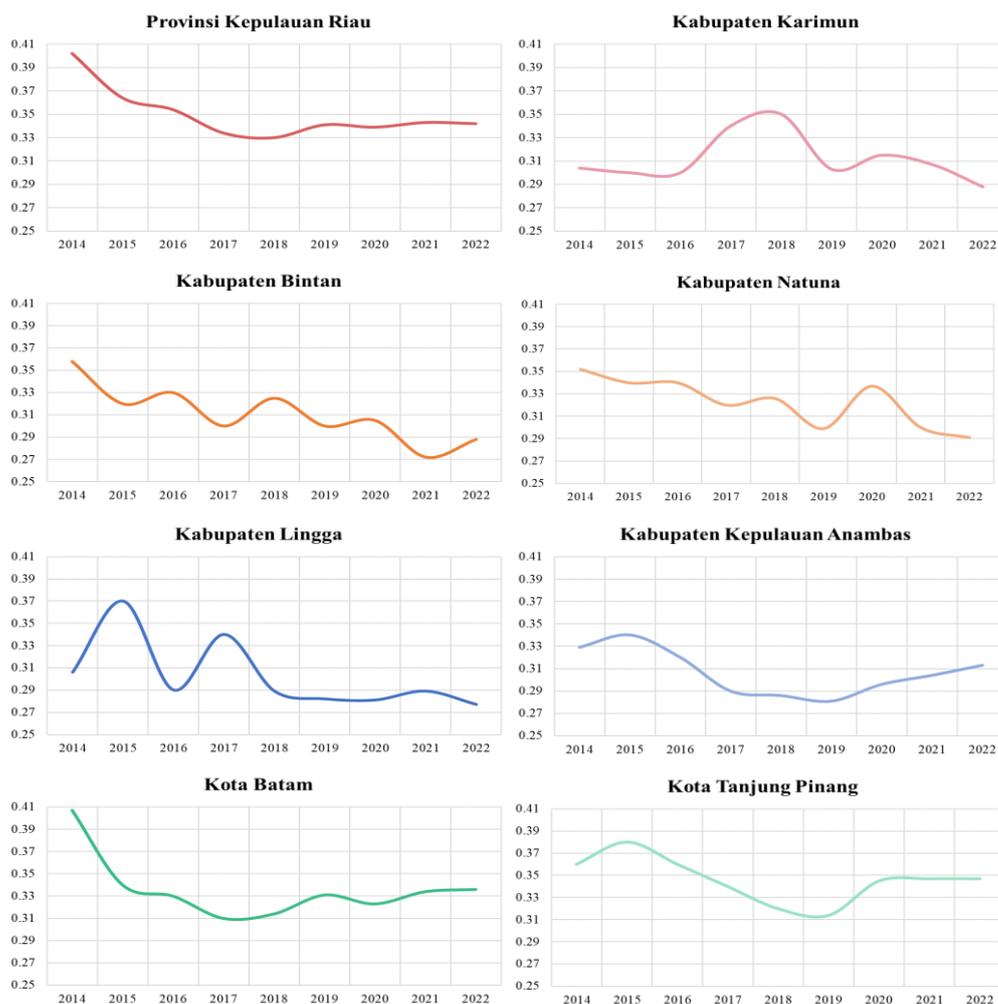
Kabupaten/ Kota	2010	2022
Karimun	Pertanian, Perdagangan, Transportasi, Akomodasi Makan Minum, Infokom, Real Estat, Jasa Perusahaan, Adm. Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Jasa Lainnya.	Pertanian, Perdagangan, Transportasi, Akomodasi Makan Minum, Infokom, Real Estat, Jasa Perusahaan, Adm. Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Jasa Lainnya dan <b>Konstruksi</b>
Bintan	Pertanian, Industri, Perdagangan, Akomodasi Makan Minum dan Pendidikan	Pertanian, Industri, Perdagangan, Akomodasi Makan Minum, Pendidikan, <b>Konstruksi, Transportasi, Adm. Pemerintahan, dan Kesehatan</b>
Natuna	Pertanian dan Pertambangan	Pertanian dan Pertambangan
Lingga	Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, Akomodasi Makan Minum, Infokom, Real Estat, Adm. Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Jasa Lainnya.	Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, Akomodasi Makan Minum, Infokom, Real Estat, Adm. Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Jasa Lainnya.
Kepulauan Anambas	Pertanian dan Pertambangan	Pertanian dan Pertambangan
Batam	Industri, Listrik dan Gas, Air, Konstruksi, Transportasi, Akomodasi Makan Minum, Infokom, Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	Industri, Listrik dan Gas, Air, Konstruksi, Infokom, Keuangan
Tanjungpinang	Konstruksi, Perdagangan, Transportasi, Infokom, Keuangan, Real Estat, Jasa Perusahaan, Adm. Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Jasa Lainnya.	Konstruksi, Perdagangan, Transportasi, Infokom, Keuangan, Real Estat, Jasa Perusahaan, Adm. Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Jasa Lainnya.

Sumber: (BPS 2023, diolah)

Analisis LQ menunjukkan bahwa secara keseluruhan pertanian masih menjadi sektor basis bagi seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dari tahun 2010 ke tahun 2022, terdapat 3 kabupaten dan 1 kota yang sektor basisnya tetap, yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan sektor basis Pertanian dan Pertambangan, Kabupaten Lingga dengan sepuluh sektor basisnya dan Kota Tanjungpinang dengan 11 sektor basisnya yang seluruhnya adalah sektor jasa-jasa. Kabupaten Karimun mengalami sedikit perubahan dengan masuknya sektor konstruksi sebagai sektor basis, sedangkan Kabupaten Bintan banyak berkembang dengan penambahan empat sektor basis. Kota Batam yang pada tahun 2010 memiliki sepuluh sektor basis, kini berkurang menjadi enam sektor basis. Pergeseran ini disebabkan karena peningkatan peran masing-masing sektor basis tersebut yang lebih cepat ataupun lebih lambat dari perkembangannya di level provinsi.

### 3.2 Analisis Ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Koefisien Gini

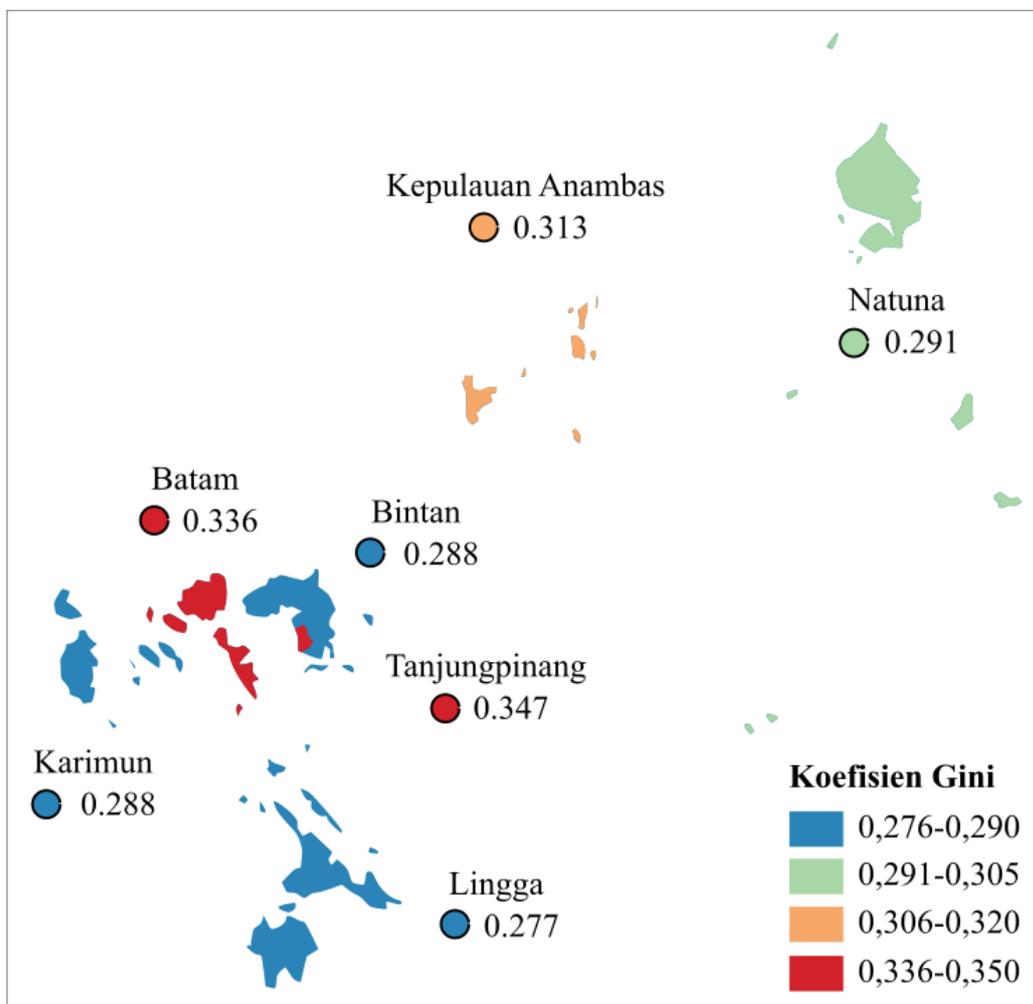
Untuk menilai tingkat ketimpangan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS, 2023b) memanfaatkan data pengeluaran dari Susenas sebagai pengganti pendapatan. Berikut disajikan evolusi Koefisien Gini di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau selama rentang waktu 2014 hingga 2022.



Gambar 2. Perkembangan Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2014-2022

Berdasarkan data Koefisien Gini di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren penurunan selama satu dekade terakhir. Distribusi pengeluaran di provinsi ini relatif merata, dengan rata-rata koefisien Gini sebesar 0,35 selama 10 tahun terakhir. Jika melihat tren per kabupaten/kota, Kabupaten Bintan, Natuna, dan Lingga mengalami penurunan ketimpangan yang konsisten. Di sisi lain, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan penurunan ketimpangan di pertengahan periode, namun sedikit meningkat pada beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, Kabupaten Karimun mengalami peningkatan ketimpangan pada pertengahan periode, namun trennya kembali menurun pada beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2022, dibandingkan dengan wilayah lainnya, ketimpangan distribusi pengeluaran tertinggi berada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, dengan Koefisien Gini masing-masing sebesar 0,336 dan 0,347. Sementara itu, Kabupaten Karimun, Bintan, dan Lingga memiliki tingkat ketimpangan terendah, meskipun ketimpangan di semua wilayah ini masih berada dalam kategori relatif merata (di bawah 0,35).



Gambar 3. Peta Tematik Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

### Koefisien Variasi

Koefisien variasi menunjukkan kesenjangan PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tergolong besar, namun trennya cenderung menurun pada periode sebelum pandemi, menunjukkan adanya peningkatan homogenitas. Selama periode pandemi, ketimpangan tersebut mencapai titik terendahnya, namun kembali meningkat pada tahun 2021-2022.



**Gambar 4. Koefisien Variasi PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2013-2022**

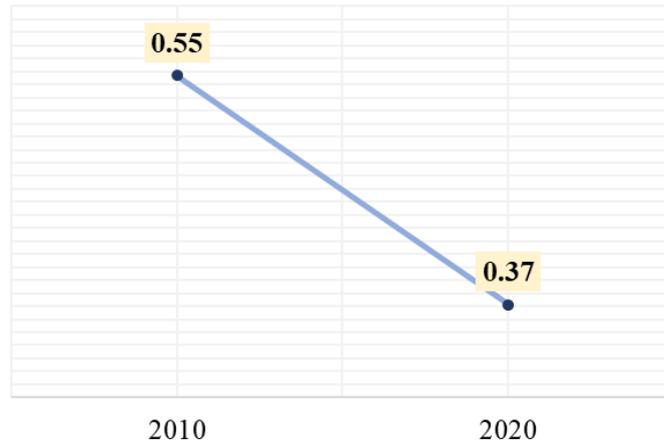
Selama masa pandemi, kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi, yaitu Natuna dan Kepulauan Anambas, mengalami penurunan signifikan dalam pendapatan per kapita. Penurunan ini menyebabkan penyempitan kesenjangan antar kabupaten/kota di tahun 2020. Namun, seiring dengan pulihnya pendapatan di kedua kabupaten tersebut, kesenjangan kembali meningkat, yang berkontribusi pada naiknya ketimpangan pada periode 2021-2022.

**Tabel 3. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Koefisien Variasi, 2013-2022**

Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karimun	35.01	38.63	42.75	46.68	50.69	54.64	57.73	52.64	54.71	58.44
Bintan	84.04	92.69	101.17	107.36	115.04	124.09	132.14	130.15	130.73	138.71
Natuna	214.52	228.96	240.12	246.44	257.31	274.45	276.59	226.34	250.35	283.99
Lingga	29.55	32.33	34.35	36.91	40.97	44.35	47.45	43.58	44.70	47.18
Kepulauan Anambas	355.47	376.11	397.73	405.60	416.71	401.87	409.58	306.11	342.60	395.84
Batam	88.31	93.90	101.72	105.59	107.49	113.77	115.79	135.40	140.51	153.49
Tanjungpinang	67.52	72.93	78.34	83.35	87.36	91.16	94.40	86.62	86.13	90.86
Rata-rata	124.92	133.65	142.31	147.42	153.65	157.76	161.95	140.12	149.96	166.93
Simpangan Baku	109.98	115.95	121.78	123.22	126.07	122.01	123.07	88.59	101.33	118.91
<i>Coefficient Variation</i>	<b>88.04</b>	<b>86.76</b>	<b>85.57</b>	<b>83.58</b>	<b>82.05</b>	<b>77.34</b>	<b>75.99</b>	<b>63.23</b>	<b>67.57</b>	<b>71.23</b>

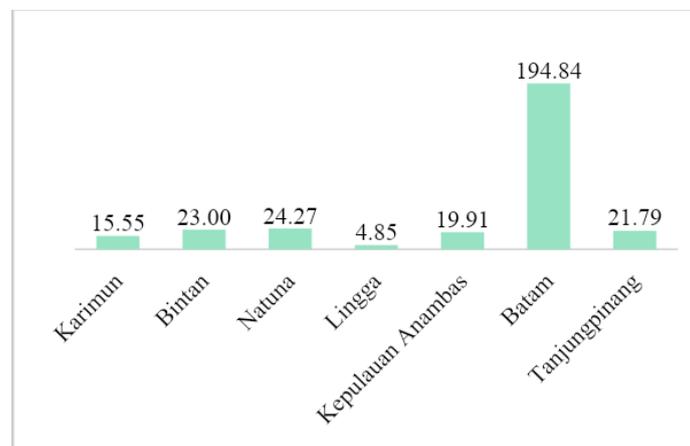
### Indeks Williamson

Setelah mempertimbangkan proporsi penduduk masing-masing kabupaten/kota, variasi data PDRB per kapita di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, distribusi pendapatan di Kepulauan Riau semakin homogen. Namun, jika dilihat dari nilai indeks, pada tahun 2010 Indeks Williamson sebesar 0,55 mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi. Kemudian, pada tahun 2020, indeks ini menurun menjadi 0,37, yang berarti ketimpangan beralih ke kategori sedang.



**Gambar 5. Indeks Williamson PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2010 dan 2020**

Berbeda dengan Koefisien Gini yang mengukur ketimpangan menggunakan pendekatan pengeluaran, Koefisien Variasi dan Indeks Williamson yang menggunakan pendekatan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau masih relatif tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya dua kabupaten dengan potensi pertambangan yang besar, yaitu Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas, yang memiliki sektor minyak dan gas. Jumlah penduduk yang relatif kecil di kedua kabupaten ini menyebabkan pendapatan per kapita mereka sangat tinggi, bahkan melampaui Kota Batam. Akibatnya, kesenjangan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota menjadi semakin lebar.



**Gambar 6. PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Triliun Rupiah), 2022**

Secara keseluruhan, PDRB ADHB di Kabupaten/Kota Kepulauan Riau masih menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara Kota Batam dan daerah lain di sekitarnya. Kota Batam mengalami pertumbuhan pesat, di mana pembangunannya diarahkan menjadi kawasan industri yang melayani kebutuhan industri Singapura karena lokasinya yang dekat dengan perbatasan Indonesia-Singapura. Hingga kini, Batam juga dikenal sebagai tujuan wisata belanja yang menarik pengunjung baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Namun, perkembangan ini belum berdampak secara merata ke daerah sekitarnya, menciptakan ketimpangan pembangunan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Poles Theory*), yang menempatkan Batam sebagai pusat pertumbuhan. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan wilayah terjadi secara bertahap, dimulai dari pusat pertumbuhan yang memiliki potensi ekonomi dan karakteristik khusus, dengan adanya keterkaitan ekonomi antar wilayah. Selain memberikan efek penyebaran sumber daya (*spread effect*), pembangunan pusat pertumbuhan juga bisa menimbulkan dampak negatif berupa pengurasan sumber daya dari daerah sekitarnya (*backwash effect*), dan gabungan keduanya dikenal sebagai *net spillover effect* (Capello, 2009).

Manfaat pembangunan pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitarnya hanya akan terasa jika didukung dengan penguatan infrastruktur dan transfer teknologi. Tanpa dukungan ini, migrasi sumber daya secara berlebihan dapat terjadi, menguras potensi daerah sekitar. Kondisi ini terlihat pada kemajuan Batam yang tidak disertai perkembangan serupa di daerah sekitarnya, yang menunjukkan kegagalan dalam proses penyebaran pertumbuhan karena tidak berfungsinya efek *trickle-down* secara optimal, sehingga ketimpangan antar wilayah semakin tajam. Daerah hinterland cenderung tertinggal akibat pengurasan sumber daya oleh pusat pertumbuhan. Industrialisasi yang tidak merata memicu efek *backwash* yang berlebihan, tanpa disertai *spread effect* yang memadai, sehingga menciptakan polarisasi dan migrasi tenaga kerja serta minat investasi yang terpusat pada kawasan pertumbuhan (Conroy, 1973).

## **KESIMPULAN**

Analisis Location Quotient (LQ) mengungkapkan peningkatan sektor basis di beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Karimun dan Bintan, yang menandakan perkembangan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara tahunan menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di provinsi ini semakin mengurangi disparitas pembangunan terhadap Kota Batam, yang telah lama menjadi pusat ekonomi yang mapan. Hasil penghitungan Koefisien Gini menunjukkan tren penurunan ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau selama dekade terakhir, dengan distribusi pengeluaran yang relatif merata, yang ditunjukkan oleh rata-rata koefisien Gini sebesar 0,35 selama 10 tahun. Akan tetapi, meskipun Koefisien Gini, yang mengukur kesenjangan melalui pendekatan pengeluaran, menunjukkan peningkatan pemerataan, Koefisien Variasi dan Indeks Williamson yang mengadopsi pendekatan pendapatan per kapita, mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan di provinsi ini masih sangat tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh dua kabupaten yang memiliki pendapatan per kapita sangat tinggi, yang berkontribusi pada perluasan kesenjangan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota dalam provinsi.

## **IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, perlu diimplementasikan serangkaian strategi kebijakan yang terintegrasi. Pemberian insentif fiskal dan subsidi untuk mendukung pengembangan investasi di sektor-sektor basis lokal seperti pertanian, pertambangan, dan jasa merupakan langkah krusial yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Ekspansi infrastruktur di daerah-daerah kurang berkembang, yang mencakup peningkatan fasilitas transportasi, energi, dan teknologi informasi, akan memfasilitasi integrasi ekonomi lokal dengan pasar yang lebih luas dan meningkatkan aksesibilitas.

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, terutama pendidikan vokasional yang relevan dengan industri setempat, adalah fundamental untuk membangun kapasitas masyarakat lokal. Ini memungkinkan warga setempat untuk lebih berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pembangunan yang inklusif harus diadopsi untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Penting juga untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam membentuk kemitraan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif juga esensial untuk mengukur kemajuan dan dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Implementasi strategi ini secara koordinatif dan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang merata dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akita, T., & Miyata, S. (2018). Spatial Inequalities in Indonesia, 1996 – 2010. *Social Indicators Research*, 138(3), 829–852.
- Ariani, A. W., & Suryantini, N. P. S. (2020). Analysis of Regional Potency (Case Study in Kutai Kartanegara and Penajam Paser Utara Regencies). *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(7), 87–95.
- Awolaran, O., Olubumuyi, O., OlaOlorun, F., Assink, M., van Rooij, F., & Leijten, P. (2022). Interventions to reduce intimate partner violence against women in low- and middle-income countries: A meta-analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 64, 101746. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2022.101746>
- Barbieri, P. (2009a). Flexible employment and inequality in Europe. *European Sociological Review*, 25(6), 621–628. <https://doi.org/10.1093/esr/jcp020>
- Barbieri, P. (2009b). Flexible employment and inequality in Europe. *European Sociological Review*, 25(6), 621–628. <https://doi.org/10.1093/esr/jcp020>
- Bisello, A. (2020). Assessing multiple benefits of housing regeneration and smart city development: the European project SINFONIA. *Sustainability*. <https://www.mdpi.com/842704>
- BPS. (2023a). *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV-2022*. <https://kepri.bps.go.id/pressrelease/2022/08/05/1376/pertumbuhan-ekonomi-kepulauan-riau-triwulan-ii-2022.html>
- BPS. (2023b). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2022*. Berita Resmi Statistik, No. 08/01/16 Januari 2023.
- Br Sitepu, P. A., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (Csr) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 80–90. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438>
- Capello, R. (2009). Spatial Spillovers and Regional Growth: A Cognitive Approach. *European Planning Studies*, 17(5), 639–658.

- Conroy, M. E. (1973). *Rejection of Growth Center Strategy in Latin American Regional Development Planning*. 49(4), 371–380.
- Esping-Andersen, G., & Myles, J. (2012). Economic Inequality and the Welfare State. In *The Oxford Handbook of Economic Inequality* (Issue April 2018). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199606061.013.0025>
- Fitri, A., Sinaga, R., Asyari, Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., Siregar, R. T., Maulina, D., Kusumaningrum, R., Sahamony, N. F., Litriani, E., & Ladjin, N. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Forgues-Puccio, G. F., & Lauw, E. (2021). Gender inequality, corruption, and economic development. *Review of Development Economics*, 25(4), 2133–2156. <https://doi.org/10.1111/RODE.12793>
- Ghifara, A. S., Iman, A. N., Wardhana, A. K., Rusgianto, S., & Ratnasari, R. T. (2022). The Effect of Economic Growth, Government Spending, and Human Development Index Toward Inequality of Income Distribution in the Metropolitan Cities in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 529–536. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1092>
- Hilmer, C. E., Hilmer, M. J., & Lusk, J. L. (2012). A comparison of salary structures between economics and agricultural economics departments. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 34(3), 489–514. <https://doi.org/10.1093/aep/pps025>
- Husain, M. I., Umer, M., Chaudhry, I. B., Husain, M. O., Rahman, R., Shakoore, S., Khaliq, A., Ali, W. M., Zaheer, J., Bassett, P., Mulsant, B. H., Chaudhry, N., & Husain, N. (2021). Relationship between childhood trauma, personality, social support and depression in women attending general medical clinics in a low and middle-income country. *Journal of Affective Disorders*, 292, 526–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.06.010>
- Khan, H. H., Malik, M. N., Zafar, R., Goni, F. A., & ... (2020). Challenges for sustainable smart city development: A conceptual framework. *Sustainable ...*. <https://doi.org/10.1002/sd.2090>
- Klasen, S. (2010). *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals* (No. 12; Sustainable Development Working Papers). <https://www.adb.org/publications/measuring-and-monitoring-inclusive-growth-multiple-definitions-open-questions-and-some>
- Lamont, M. (2018). Addressing Recognition Gaps: Destigmatization and the Reduction of Inequality. *American Sociological Review*, 83(3), 419–444. <https://doi.org/10.1177/0003122418773775>
- Ma, B., Cai, Z., Zheng, J., & Wen, Y. (2019). Conservation, ecotourism, poverty, and income inequality – A case study of nature reserves in Qinling, China. *World Development*, 115, 236–244. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.11.017>
- Mumtaz, Z., & Whiteford, P. (2017). Social safety nets in the development of a welfare system in Pakistan: an analysis of the Benazir Income Support Programme. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 39(1), 16–38. <https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1290902>

- Myeong, S., Jung, Y., & Lee, E. (2018). A study on determinant factors in smart city development: An analytic hierarchy process analysis. *Sustainability*. <https://www.mdpi.com/319742>
- Niekerk, A. J. . (2020). Towards inclusive growth in Africa. *Development Southern Africa*, 37(3), 519–533. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2020.1736004>
- Nugroho, A. A. (2018). Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Pengembangan Ekonomi Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 30–36.
- Nurzaman, S., & Rifa'i, A. (2019). Strategi Pembangunan Desa Di Daerah Tertinggal Pada Kawasan Konservasi Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Batu Sanggan. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 224–232. [https://doi.org/10.25299/JIAP.2019.VOL5\(2\).4347](https://doi.org/10.25299/JIAP.2019.VOL5(2).4347)
- Pudzis, E., Geipele, S., & Geipele, I. (2016). Community Participation in Village Development: the Scale of Latvia. *Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management*, 4(1), 84–99. <https://doi.org/10.1515/bjreecm-2016-0007>
- Raharti, R., Laras, T., & Oktavianti. (2021). Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 257–270. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.2422>
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Rudiana. (2016). Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Singh, A. K., Arya, A. K., & Jyoti, B. (2019). A conceptual review on economic, business, intellectual property rights and science & technology related activities in Asian economies. *JNNCE Journal of Engineering & Management (JJEM)*, 3(2), 1.
- Snyder, K. A. (2004). Routes to the informal economy in New York's East Village: Crisis, economics, and identity. *Sociological Perspectives*, 47(2), 215–241. <https://doi.org/10.1525/sop.2004.47.2.215>
- Sufriyadi, M. (2014). Analisis Penerapan E- Government Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan. *Motivation and Emotion*, 30(3), 243–250.
- Todaro, & Smith. (2012). *Economic Development (11th ed.)*. Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nation Conference on Trade and Development. (2010). Strengthening the Creative industries for Development. *UNCTAD/DITC/TAB/2009/1 Copyright*, 1–116.

- Winarsi, S., Prihatiningtyas, W., & Fitriana, Z. M. (2020). *Sustainable Regional Expansion Model in Order to Increase The Regional Potency: Case Study in Indonesia*. 179–186. <https://doi.org/10.5220/0010049201790186>
- Younsi, M., & Bechtini, M. (2018). Economic Growth, Financial Development, and Income Inequality in BRICS Countries: Does Kuznets' Inverted U-Shaped Curve Exist? *Journal of the Knowledge Economy*, 11(2), 721–742. <https://doi.org/10.1007/s13132-018-0569-2>
- Zasriati, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia Tahun 2010-2020. *Al Dzahab: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 3(2), 119–131.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Aplikasi Iptek Untuk Masyarakat*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.1124/dmd.107.015933>